

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN DI KAWASAN PERMUKIMAN

Oleh :

Gamawan Fauzi*, Maulana Rifa'i, Made Panji Teguh Santoso

*Korespondensi Email: 1710631180068@student.unsika.ac.id

**Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia**

Abstrak

Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Permukiman sehat merupakan konsep dari permukiman sebagai faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan dikawasan permukiman didasarkan pada tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Lingkungan Sehat Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPRKP melakukan sosialisasi program lingkungan sehat perumahan ke tingkat kecamatan, lalu program tersebut disampaikan kembali kepada perangkat desa. Pembangunan rumah layak huni ditiap desa dari tahun 2016 hingga saat ini sudah hampir mencapai target sebanyak 74,24%. Faktor lingkungan masih kurang mendukung berjalannya program dengan lancar. Lingkungan budaya dimana rumah penduduk yang berhimpit satu sama lain masih ada di beberapa desa sehingga menyulitkan proses pembangunan rumah layak huni.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, kesehatan lingkungan, permukiman, rumah layak huni

Abstract

Environmental health is an important factor in social life, and is even one of the determining elements in the welfare of the population. Healthy settlements are a concept of settlements as a factor that can improve the health standards of their residents. The implementation of the Healthy Housing Environment Program in residential areas is based on the aim of improving the health of the people of Karawang Regency. This study aims to find out how the implementation of the Healthy Housing Environment Program is carried out by the Public Housing and Settlement Areas Office (DPRKP). The results of the study concluded that the DPRKP carried out socialization of the housing healthy environment program to the sub-district level, then the program was conveyed back to the village apparatus. The construction of livable houses in each village from 2016 until now has almost reached the target of 74.24%. Environmental factors still do not support the smooth running of the program. The cultural environment where people's houses are close to each other still exists in several villages, making it difficult for the process of building decent houses to live in.

Keywords: Policy implementation, environmental health, settlements, livable houses

A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor. Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Dimana lingkungan yang sehat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang baik diperlukan suatu program peningkatan kesehatan lingkungan salah satunya kesehatan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan yaitu UU Nomor 1 Tahun 2011. Kesehatan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggung jawab bersama. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan terstruktur yang memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal. Permukiman merupakan bagian dari

pembangunan nasional yang perlu terus dikembangkan. Permukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU RI No. 4/1992).

Permukiman sehat merupakan konsep dari permukiman sebagai faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Konsep tersebut melibatkan pendekatan sosiologis dan teknis pengelolaan faktor risiko dan berorientasi pada lokasi, bangunan, kualifikasi, adaptasi, manajemen, penggunaan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan di sekitarnya, serta mencakup unsur apakah rumah tersebut memiliki penyediaan air minum dan sarana yang memadai untuk memasak, mencuci, menyimpan makanan, serta pembuangan kotoran manusia maupun limbah lainnya (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Kawasan permukiman didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, tempat bekerja yang memberi pelayanan dan kesempatan kerja terbatas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan terstruktur yang memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang baik diperlukan suatu program peningkatan kesehatan lingkungan salah satunya kesehatan lingkungan perumahan dan

permukiman. Berdasarkan visi kabupaten Karawang yaitu “Karawang yang mandiri, maju, adil, dan makmur”, maka Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mempunyai Program Lingkungan Sehat Perumahan yang menjadi tugas pokok DPRKP. Program Lingkungan Sehat Perumahan tidak hanya dilaksanakan di kawasan perumahan, tetapi juga di kawasan permukiman. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil kawasan permukiman sebagai bahan penelitian. Program Lingkungan Sehat Perumahan di kawasan permukiman diwujudkan dengan membangun rumah layak huni (Rulahu) di tiap desa atau kelurahan di Kabupaten Karawang. Pembangunan rumah layak huni ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di tempat kumuh dengan kondisi rumah temporer dan kepemilikan tanah pribadi. Rumah layak huni yang dibangun di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Karawang berjumlah 3 sampai 4 unit tiap tahunnya dengan ukuran menyesuaikan luas tanah yang dimiliki. Tetapi mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Karawang cukup banyak maka di beberapa desa maupun kelurahan, rumah penduduk berhimpit satu sama lain sehingga menyulitkan program rumah layak huni berjalan dengan baik. Program Lingkungan Sehat Perumahan di kawasan permukiman yang dilaksanakan dengan membangun rumah layak huni didasarkan pada tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Karawang. Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait bagaimana

pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Sugiyono (2014:6) menyatakan bahwa, Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Dengan menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga dapat mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Selain itu, memperbanyak penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dunia pendidikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan untuk mengetahui dan memahami Implementasi Program Lingkungan Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang. Menurut Moleong (2011:6) memaparkan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya

perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Organisasi Pengimplementator

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menjadi organisasi pengimplementator Program Lingkungan Sehat Perumahan. Sebagai organisasi pengimplementator tentu saja DPRKP membutuhkan dukungan sumber daya manusia dari pihak lain agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar, mengingat sumber daya manusia dalam DPRKP tidak memadai.

DPRKP sebagai organisasi pengimplementator sudah bekerja dengan baik, karena melibatkan camat, kepala desa/lurah, RW, dan juga RT dalam pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan. DPRKP melakukan sosialisasi program lingkungan sehat perumahan ke tingkat kecamatan, lalu program tersebut disampaikan kembali oleh pihak kecamatan kepada kepala desa atau perangkat desa, yang kemudian program tersebut di bahas dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang dihadiri oleh para RT maupun RW masing-masing dusun yang ada di desa tersebut. Masing-masing RT kemudian melakukan pendataan terhadap warga yang dianggap berhak menerima Program Lingkungan Sehat Perumahan berupa Rumah Layak Huni (Rulahu). Data

yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada kepala desa untuk selanjutnya diproses di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Organisasi pengimplementator adalah DPRKP tetapi karena melibatkan camat, kepala desa, RT dan juga RW dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan, maka program ini mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sepenuhnya berjalan lancar. Namun, dalam pendataan masyarakat yang berhak menerima program Rumah Layak Huni sering kali ketua RT tidak mendatanya dengan benar, sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh DPRKP, sehingga kemungkinan program ini salah sasaran masih terjadi di beberapa desa, karena tidak adanya pengecekan lapangan dari DPRKP terhadap rumah yang akan mendapat program ruluha tersebut.

Kelompok Sasaran

Menurut DPRKP, kondisi lingkungan tempat kita tinggal dapat mempengaruhi tingkat kesehatan. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar. Untuk menunjang fungsi rumah yang baik maka syarat sebagai tempat berlindung harus dipenuhi. Namun untuk mewujudkan rumah yang baik bukanlah hal yang mudah karena ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatannya yang kurang. Sehingga pembenahan rumah tidak layak huni oleh pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan sehat. Program Lingkungan Sehat Perumahan diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah layak huni. Dengan dibangunnya rumah layak huni, kehidupan masyarakat kurang

mampu dapat terbantu.

Sebuah program dikatakan berhasil jika kelompok sasaran yang dituju jelas dan tepat. Pemilihan kelompok sasaran Program Lingkungan Sehat Perumahan yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menurut peneliti sudah tepat karena menempatkan masyarakat miskin dengan bukti adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan dari desa yang tinggal di tempat kumuh, memiliki kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), dengan kondisi rumah tidak layak huni atau bersifat temporer (terbuat dari kayu/bambu dan bilik), dan kepemilikan tanah pribadi sebagai kelompok sasaran dari program tersebut dengan pengajuan berasal dari pemerintah desa. Kepemilikan tanah pribadi dengan bukti surat tanah diperlukan agar suatu saat tidak terjadi gugatan dari pemilik tanah atas bangunan tersebut dikemudian hari.

Kelompok sasaran dikatakan sudah tepat juga karena masyarakat yang menerima program rumah layak huni menerima dampak atau manfaat yang sangat baik bagi kelangsungan hidupnya. Dengan adanya program rumah layak huni kondisi rumah menjadi lebih baik sehingga masyarakat merasa nyaman. Masyarakat pun tidak lagi mengkhawatirkan kondisi rumah temporeranya yang kapan saja dapat roboh ketika adanya hujan atau angin. Keadaan rumah menjadi lebih bersih dari sebelumnya, sehingga masalah kesehatan seperti diare, penyakit kulit, dan penyakit yang ditimbulkan dari nyamuk dapat dicegah.

Kebijakan

Kebijakan Program Lingkungan Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang yang dijabarkan dengan membangun rumah layak huni sebanyak 3 sampai 4 bagi setiap desa pertahunnya, dirasa sudah berhasil. Jumlah pembangunan rumah layak huni di tiap desa dibatasi karena dana yang disalurkan pemerintah daerah terbatas, sehingga pembangunan dilaksanakan secara bergulir dari satu desa ke desa lain dalam satu tahun. Rumah layak huni diadakan secara 2 gratis, dengan ukuran bangunan rumah 30m atau menyesuaikan ukuran tanah yang dimiliki, bangunan rumah bersifat permanen dan semi permanen, dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi dengan adanya saluran air di bawah tanah. Berdasarkan Desa Telukjambe Timur yang peneliti jadikan sebagai tempat studi kasus, pada tahun 2019 ini sudah ada 4 rumah yang mendapat program rumah layak huni. Pembangunan rumah layak huni juga tidak lepas dari penongontrolan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama 6 bulan setelah rumah selesai di bangun, untuk memastikan tidak ada kerusakan. Bila terjadi kerusakan pada rumah selama masa pengontrolan, masih menjadi tanggung jawab dinas. Selama 6 bulan itu pula rumah tidak diperkenankan untuk direnovasi oleh pemilik rumah.

Lingkungan

Dalam pengimplementasian program lingkungan sehat perumahan ini, faktor lingkungan budaya masih kurang mendukung berjalannya program dengan lancar. Lingkungan

budaya yang dimaksud adalah lahan sempit yang tetap dibangun rumah karena masyarakat masih mempunyai pemikiran “rumah dapat dibangun dimana saja, yang penting ada tempat untuk bernaung”. Pemikiran seperti itu menyebabkan rumah yang berhimpit satu sama lain atau disebut padat bangunan masih ada di beberapa desa sehingga menyulitkan proses pembangunan rumah layak huni, karena kondisi lingkungan rumah yang baik harus memiliki jarak masing-masing 5m di bagian depan, belakang, samping kiri dan kanan rumah agar cahaya matahari mudah masuk ke dalam. Kondisi padat bangunan seperti itu membuat pemerintah kurang optimal dalam memberikan rumah layak huni karena 2 ukuran rumah yang diberikan diperkecil, tidak lagi 30m . Berdasarkan hasil penelitian dari lima rumah yang kami kunjungi hanya tiga rumah yang memenuhi syarat kondisi lingkungan rumah yang baik.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan yang dijabarkan dalam pembangunan Rumah Layak Huni dirasa sudah cukup efektif. Dalam pelaksanaannya DPRKP dibantu oleh camat, kepala desa/lurah, RW juga RT dalam pensosialisasian program tersebut. Program rumah layak huni, sudah dijalankan sesuai target dimana jumlah rumah tiap desa yang mendapat bantuan rumah layak huni 3 sampai 4 pertahunnya dan mencapai kira-kira 1000 rumah setiap tahunnya.

2. Kelompok sasaran yang dituju sudah tepat, yaitu masyarakat kurang mampu. Namun seringkali ada pihak RT yang tidak mendata dengan benar, sehingga masih ada beberapa masyarakat di beberapa desa yang tidak mendapat rumah layak huni. Kelompok sasaran yang dituju oleh DPRKP dalam program ini merasa sangat terbantu, karena rumah sebagai tempat tinggal mereka kini sudah layak huni.
3. Kebijakan Program Lingkungan Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang yang dijabarkan dengan membangun rumah layak huni sebanyak 3 sampai 4 bagi setiap desa pertahunnya sudah sesuai dengan aturan dan relugasi yang ada.
4. Sayangnya, faktor lingkungan dimana kondisi rumah yang bersifat padat bangunan, yaitu berhimpit satu sama lain membuat pembangunan rumah layak huni kurang optimal. Tidak sesuai dengan syarat disebutnya sebagai rumah yang baik.

Saran

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai implementator dan pengawas perlu meningkatkan koordinasi dengan perangkat dibawahnya dari kecamatan, desa, sampai ke tingkat RT dalam menjalankan Program Lingkungan Sehat Perumahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pun seharusnya melakukan pengecekan langsung ke rumah-rumah penerima program Rumah layak huni sebelum pembangunan rumah berjalan, agar

program ini benar - benar tepat sasaran dan tidak ada lagi warga yang terlewatkan dalam mendapatkan program pembangunan rumah layak huni. Penambahan dari segi anggaran juga seharusnya lebih diupayakan lagi agar pembangunan rumah layak huni dapat meningkatkan target pencapaian, dan dilaksanakan dengan cepat dan optimal, tidak hanya membangun empat rumah setiap tahunnya. Sehingga seluruh masyarakat yang kurang mampu dan memenuhi syarat untuk mendapat rumah yang layak huni segera terealisasi.

<https://prkpkarawang.com/> (diakses pada 16 November 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Khusna, Al Atiyatul. 2013. Hubungan Higienitas Dan Faktor Lingkungan Dengan Kejadian Penyakit Dermatitis Di Wilayah Puskesmas Somagede Kabupaten Banyumas. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Khusna, Al Atiyatul. 2013. Hubungan Higienitas Dan Faktor Lingkungan Dengan Kejadian Penyakit Dermatitis Di Wilayah Puskesmas Somagede Kabupaten Banyumas. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- EP, Andika. Kesehatan Mata. www.academia.edu (diakses 16 November)
- Wiwaha, Arjuna. Bidang Perumahan dan Permukiman. 2019. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/> (diakses tanggal 16 November 2019)
- Zuliya, Alissa. 2019. Kepemimpinan Millenial Dalam Menerapkan Pola Hidup Sehat. Universitas Ahmad Dahlan.
- Yogo. 2019. Program Prioritas Tahun 2019 Dinas PRKP Kabupaten Karawang. <https://prkpkarawang.com/> (diakses pada 16 November 2019)
- Yogo. 2019. Profil Dinas PRKP Kabupaten Karawang.